

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Yuliesti Rosalia

Yuliestirosalia@yahoo.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of the revenue sources for the country. Therefore, tax revenue becomes the larger contribution of state revenue and expenditure. For the company, tax is considered as the burden which will decrease the profit of the company. It has made the company try to find a way to decrease the tax cost. This research is meant to test the influence of return on assets, current ratio, institutional ownership, independent commissioner, audit quality, and audit committee to the tax avoidance. This research is quantitative research. The population is State Owned Enterprises (BUMN) which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX), meanwhile the sample is have been selected by using purposive sampling technique and 64 companies have been selected as samples. The result of this research shows that: (1) return on asset does not have any influence to the tax avoidance; (2) current ratio does not have any influence to the tax avoidance; (3) institutional ownership has negative influence to the tax avoidance; (4) independent commissioner has negative influence to the tax avoidance; (5) audit quality does not have any influence to the tax avoidance; (6) audit committee does not have any influence to the tax avoidance.

Keywords: Profitability, liquidity, corporate governance, tax avoidance.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *return on assets*, *current ratio*, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 64 sampel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (2) *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (4) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (5) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (6) komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, *corporate governance*, penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satunya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak (Handayani, 2015:2). Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak. Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya adalah tingkat likuiditas perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012:168) likuiditas perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dimana jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Pohan (2008) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil dari penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak menjadi motivasi penelitian ini. Objek penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pengambilan objek penelitian tersebut didasari oleh fenomena penghindaran pajak yang dilakukan BUMN di Indonesia. Pertimbangan lain peneliti dalam menggunakan BUMN sebagai objek penelitian adalah BUMN sebagai agen pembangunan nasional seharusnya bertindak sebagai pelopor dan menjadi panutan sehingga dapat memotivasi wajib pajak yang lain agar dapat lebih taat dalam perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah *return on assets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? (2) Apakah *current ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? (3) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? (4) Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? (5) Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? (6) Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak; (2) Untuk menguji pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak; (3) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak; (4) Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak; (5) Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak; (6) Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). *Agent* berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, *agent* menuntut *principal* untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan *agent*. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. Hanggraeni (2014:68) mengatakan *agency problem* salah satunya disebabkan oleh adanya *asymmetric information*, yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan *agent* karena dengan melakukan manajemen pajak maka *agent* akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan *principal*.

Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2012:81) profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on total assets* (ROA). Hanafi dan Halim (2012:81) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013:58). Menurut Rodriguez dan Arias (2013) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Likuiditas

Hanafi dan Halim (2012:75) mendefinisikan likuiditas sebagai ukuran kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Likuiditas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *current ratio*. *Current ratio* menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya utang-utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca (Hanafi dan Halim, 2012:202). Menurut Suyanto dan Supramono (2012:168) perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak.

Good Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001:1) dalam publikasi pertamanya mendefinisikan *good corporate governance* berdasarkan *Cadbury Committee*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut (Hanggraeni, 2014:61). Menurut Hanggraeni (2014:83) mekanisme tata kelola pada dasarnya terdiri dari pengendalian di dalam atau internal dan pengendalian lingkungan atau eksternal. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan diatas lima persen tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial (Pohan, 2008).

2. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya,

anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Kualitas Audit

Menurut Maharani dan Suardana (2014:529) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dewi dan Jati (2014:258) menjelaskan bahwa KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *Non The Big Four* yang memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Terdapat empat KAP *The Big Four* di Indonesia, yaitu:

- a) *Price WaterHouse Coopers (PWC)*, bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Sutanto dan Rekan, Haryanto Sahari dan Rekan, Tajudierdja Wibisana dan Rekan.
- b) *Ernst and Young (EY)*, bekerjasama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surya.
- c) *The Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte)*, bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan Rekan.
- d) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*, bekerjasama dengan KAP Sidharta, Widjaja dan Rekan.

4. Komite Audit

Menurut Hanggraeni (2014:81) komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2011:17).

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Manajemen Pajak

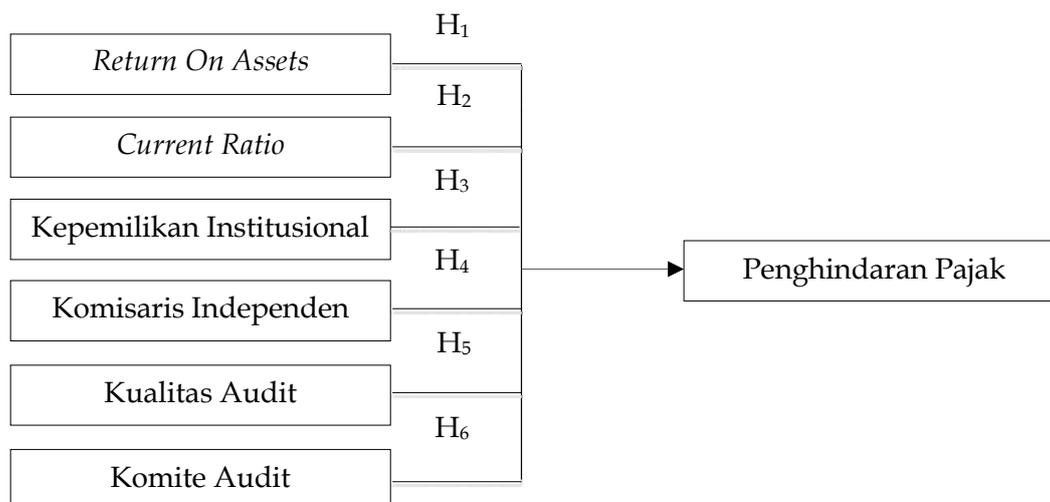
Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban pajak yang diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen suatu perusahaan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi dan perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Suandy, 2008:5-6).

Penghindaran Pajak

Menurut Prebble dan Prebble (2012:702), penggelapan pajak dan penghindaran pajak melibatkan perilaku wajib pajak yang sama dan masing-masing dilakukan atas tujuan luas yang sama yaitu untuk meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak, namun terdapat perbedaan secara hukum antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, bahwa *tax evasion* adalah pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:474) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan teoretis yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : *Return on asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₂ : *Current ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₄ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₅ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₆ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Sedangkan menurut karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif (*Causal-Comperative Research*). Penelitian kausal komparatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Gambaran populasi yang dijadikan objek penelitian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dalam penelitian ini selama tahun 2012-2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasar tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam hal ini adalah data sekunder diakses melalui Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) STIESIA Surabaya dan melalui website BEI *www.idx.co.id*. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan, laporan tahunan dan ringkasan kinerja dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode tahun 2012-2015.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Konsep Variabel	Pengukuran	Skala
1	<i>Cash Effective Tax Rate</i>	Kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.	$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba bersih sebelum pajak}}$	Rasio
2	<i>Return On Asset</i>	Ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total asset}}$	Rasio
3	<i>Current Ratio</i>	Ukuran kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.	$CR = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$	Rasio
4	Kepemilikan Institusional	Prosentase saham yang dimiliki institusi tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial.	$KI = \frac{\sum \text{Saham pihak institusi}}{\sum \text{Saham beredar}}$	Rasio
5	Komisaris Independen	Anggota dewan komisaris yang bebas dari hubungan bisnis untuk dapat bertindak independen.	$KoIn = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}}$	Rasio
6	Kualitas Audit	Jenis KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.	Dummy: 0 = KAP <i>non the big four</i> 1 = KAP <i>the big four</i>	Nominal
7	Komite Audit	Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan.	$KoA = \sum \text{komite audit}$	Ordinal

Sumber: Data diolah dari peneliti terdahulu

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Penelitian ini menggunakan pengukuran *mean*, standar deviasi, maksimum, minimum dan *sum*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu (1) Analisis Grafik; metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Pada prinsipnya normalitas dapat

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2016:156). (2) Analisis Statistik; Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016:158). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka data residual berdistribusi tidak normal.

H_1 : Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2016:103). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu (1) Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2016:134). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (2) Uji Glejser; Uji Glejser dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

H_1 : Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2016:107). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu (1) Uji Durbin-Watson; dasar pengambilan keputusannya yaitu angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif, angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. (2) *Run test*; jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2016:116). *Run Test* dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Jika sig. $< 5\%$, maka residual tidak random atau terjadi autokorelasi.

H_1 : Jika sig. $> 5\%$, maka residual random atau tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016:93). Adapun model persamaan regresinya dirumuskan:

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 CR + \beta_3 KI + \beta_4 KoIn + \beta_5 KA + \beta_6 KoA + e$$

Notasi:

CETR = Penghindaran Pajak

ROA = Return On Asset

CR = Current Ratio

KI = Kepemilikan Institusional

KoIn = Komisaris Independen

KA	= Kualitas Audit
KoA	= Komite Audit
α	= Konstanta
β_1	= Koefisien regresi <i>Return on asset</i>
β_2	= Koefisien regresi <i>Current ratio</i>
β_3	= Koefisien regresi Kepemilikan institusional
β_4	= Koefisien regresi Komisaris independen
β_5	= Koefisien regresi Kualitas audit
β_6	= Koefisien regresi Komite audit
e	= error

Analisis Goodness of Fit Model

Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi bertujuan mengukur kemampuan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan skala-skala tertentu. Beberapa kriteria tentang kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menurut Sugiyono (2008:231) yaitu:

0,00 - 1,199	= sangat rendah
0,20 - 0,399	= rendah
0,40 - 0,599	= sedang
0,60 - 0,799	= kuat
0,80 - 1,000	= sangat kuat

Koefisien Determinasi Multiple (R²)

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan nilai antara nol dan satu. Setiap tambahan satu variabel independen maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2016:95). Jika R² mendekati 1 (semakin besar nilai R²), menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji *joint* hipotesa bahwa b₁, b₂, dan b₃ secara simultan sama dengan nol (Ghozali, 2016:96). Adapun kriteria pengujian adalah:

H₀ : Jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka semua variabel independen secara serentak tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

H₁ : Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dilakukan uji hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoretis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ dan tingkat kepercayaan yang digunakan 95%, yaitu apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H₀ ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H₀ didukung, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
CETR	64	15.93	72.04	2015.63	31.4942	12.07261
ROA	64	.79	23.42	424.71	6.6361	5.98661
CR	64	48.16	486.74	10013.04	156.4537	79.42171
KI	64	66.04	99.99	5966.58	93.2278	7.94437
KoIn	64	20.00	75.00	2706.80	42.2938	11.55214
KA	64	.00	1.00	41.00	.6406	.48361
KoA	64	3.00	8.00	272.00	4.2500	1.20844
Valid N (listwise)	64					

Sumber: Output SPSS

Berdasar tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 64 data pengamatan dengan deskripsi sebagai berikut:

Penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) memiliki *mean* sebesar 31.4942 dengan standar deviasi sebesar 12.07261. Nilai CETR terkecil yaitu senilai 15.93% dan nilai CETR terbesar yaitu senilai 72.04%.

Return on asset (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas memiliki *mean* sebesar 6.6361 dan nilai standar deviasi sebesar 5.98661 dengan nilai minimum 0.79 dan nilai maksimum 23.42.

Likuiditas yang dihitung dengan *current ratio* (CR) memiliki standar deviasi sebesar 79.42171 dan *mean* sebesar 156.4537 dengan nilai maksimum sebesar 486.74 dan nilai minimum sebesar 48.16.

Kepemilikan institusional (KI) diperoleh *mean* sebesar 93.2278 dan nilai standar deviasi sebesar 7.94437 dengan nilai minimum 66.04% dan nilai maksimum 99.99%.

Komisaris independen (KoIn) memiliki standar deviasi sebesar 11.55214 dan *mean* sebesar 42.2938 (42%) dengan nilai minimum sebesar 20% dan nilai maksimum sebesar 75%.

Tabel 3
Frekuensi Kualitas Audit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	23	35.9	35.9	35.9
1	41	64.1	64.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS

Kualitas audit (KA) diperoleh *mean* sebesar 0.6406 dan nilai standar deviasi sebesar 0.48361. Dari total 64 sampel yang diolah, sebanyak 23 (35.9%) sampel diaudit oleh KAP *Non The Big Four* dengan nilai 0, sedangkan sampel yang diaudit oleh KAP *The Big Four* sebanyak 41 (64.1%) sampel dengan nilai 1.

Tabel 4
Frekuensi Komite Audit

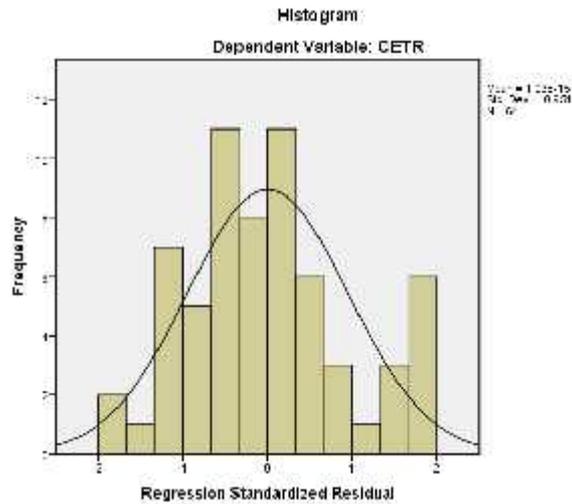
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	21	32.8	32.8	32.8
4	19	29.7	29.7	62.5
5	15	23.4	23.4	85.9
6	7	10.9	10.9	96.9
8	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS

Nilai standar deviasi komite audit (KoA) sebesar 1.20844 dan *mean* sebesar 4.2500. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi persyaratan *corporate governance* dari sisi komite audit sebesar 4,25 (syarat minimal 3 orang). Dari total 64 sampel yang diolah, sebanyak 21 (32,8%) sampel memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang menjadi nilai minimum dan 2 (3,1%) sampel memiliki nilai maksimum sebanyak 8 orang.

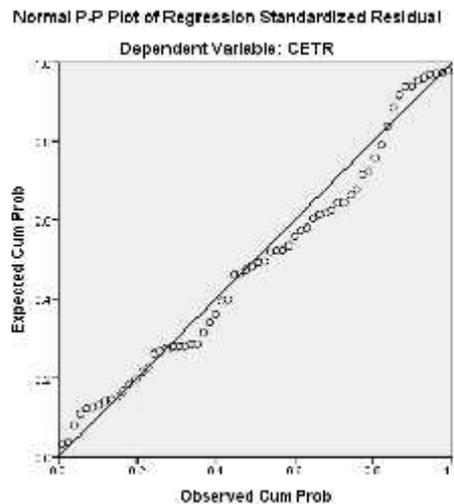
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2
Grafik Histogram
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Hasil tersebut tidak menunjukkan adanya kemencengan (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan sehingga grafik histogram dinyatakan normal.



Gambar 3
Grafik Normal Probability Plot
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.03505579
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.072
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-smirnov Statistic Test* sebesar 0.083 dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

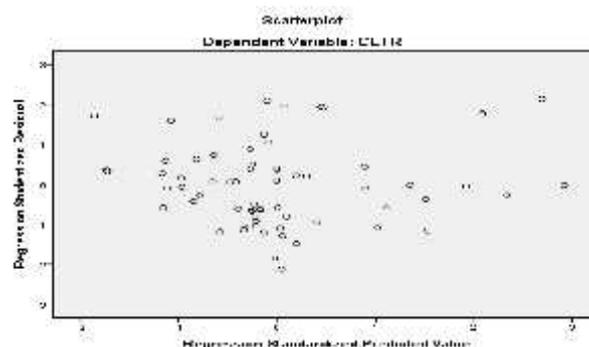
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	.414	2.417
	CR	.556	1.799
	KI	.568	1.762
	KoIn	.476	2.103
	KA	.453	2.208
	KoA	.813	1.230

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 diketahui hasil perhitungan menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10. Jadi disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4
Grafik Scatterplot
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penghindaran pajak berdasarkan masukan variabel independen *return on asset*, *current ratio*, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Tabel 7
Hasil Uji Glejser

Model	T	Sig.
1 (Constant)	.000	1.000
ROA	-.582	.563
CR	1.325	.190
KI	1.008	.317
KoIn	-.855	.396
KA	-.703	.485
KoA	-.528	.600

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 7, persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi yang kesemuanya diatas 5%, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, dengan kata lain semua variabel independen yang terdapat dalam model memiliki sebaran varian yang sama.

Uji Autokorelasi

Tabel 8
Hasil Uji Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.376

a. Predictors: (Constant), KoA, ROA, KI, KoIn, CR, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Hasil uji autokorelasi pada tabel 8, diperoleh nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1.376 yaitu berada diantara angka -2 sampai +2. Dengan demikian model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

Tabel 9
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.23429
Cases < Test Value	32
Cases >= Test Value	32
Total Cases	64
Number of Runs	31
Z	-.504
Asymp. Sig. (2-tailed)	.614

a. Median

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai test adalah -0.23429 dengan probabilitas 0.614 signifikan pada 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random dan acak atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Hasil ini konsisten dengan hasil uji DW.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	147.449	14.339
ROA	-.307	.242
CR	-.012	.016
KI	-.971	.156
KoIn	-.382	.117
KA	4.554	2.863
KoA	-1.942	.855

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 147.449 - 0.307\text{ROA} - 0.012\text{CR} - 0.971\text{KI} - 0.382\text{KoIn} + 4.554\text{KA} - 1.942\text{KoA} + e$$

Analisis Goodness of Fit Model

Koefisien Korelasi (R)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model	R
1	.813 ^a

a. Predictors: (Constant), KoA, ROA, KI, KoIn, CR, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Nilai koefisien korelasi (R) pada tabel 11 sebesar 0.813 atau 81.3% yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sangat kuat.

Koefisien Determinasi Multiple (R²)

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.660	.625

a. Predictors: (Constant), KoA, ROA, KI, KoIn, CR, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 12 diperoleh nilai *Adjusted R square* (R²) sebesar 0.625, yang berarti bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 62.5% dan sisanya sebesar 37.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji F)

Tabel 13
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6064.122	6	1010.687	18.476	.000 ^b
	Residual	3117.997	57	54.702		
	Total	9182.119	63			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KoA, ROA, KI, KoIn, CR, KA

Sumber: Output SPSS

Hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 18.476 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, karena probabilitas signifikansi < 0.05 , sehingga disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak (CETR) atau *return on asset* (ROA), *current ratio* (CR), kepemilikan institusional (KI), komisar independen (KoIn), kualitas audit (KA) dan komite audit (KoA) secara serentak dan signifikan mempengaruhi penghindaran pajak (CETR).

Pengujian Hipotesis Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 14
Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	10.283	.000
ROA	-1.270	.209
CR	-.768	.446
KI	-6.237	.000
KoIn	-3.267	.002
KA	1.591	.117
KoA	-2.270	.027

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t hitung variabel *return on asset* sebesar -1.270 dengan tingkat signifikan sebesar 0.209, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.209 > 0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti. Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t hitung variabel *current ratio* sebesar -0.768 dengan tingkat signifikan sebesar 0.446, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.446 > 0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan *current ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti. Sehingga H_2 ditolak dan H_0 diterima.

Pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai t hitung variabel kepemilikan institusional sebesar -6.237 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.000 < 0.05$), maka hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti. Sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Pengujian hipotesis keempat diperoleh nilai t hitung variabel komisar independen sebesar -3.267 dengan tingkat signifikan sebesar 0.002, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.002 < 0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan komisar independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti. Sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Pengujian hipotesis kelima diperoleh nilai t hitung variabel kualitas audit sebesar 1.591 dengan tingkat signifikan sebesar 0.117, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.117 > 0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti. Sehingga H_5 ditolak dan H_0 diterima.

Pengujian hipotesis keenam diperoleh nilai t hitung variabel komite audit sebesar -2.270 dengan tingkat signifikan sebesar 0.027, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.027 < 0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti. Sehingga H_0 ditolak dan H_6 diterima.

Pembahasan

Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.209 (lebih besar dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0.307. Meskipun hipotesis pada penelitian ini ditolak, namun koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan semakin tinggi ROA maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga dapat diketahui bahwa BUMN yang mempunyai tingkat ROA yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan untuk BUMN yang mempunyai tingkat ROA yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

ROA tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dikarenakan berdasarkan data sampel menunjukkan bahwa terjadi penurunan ROA yang berturut-turut pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2012 sampai 2015, namun rasio CETR justru meningkat dari tahun 2012 sampai 2015. Dimana diketahui semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Artinya meskipun BUMN memiliki tingkat ROA yang terus menurun dari tahun ke tahun namun memiliki tingkat CETR yang semakin meningkat sehingga penghindaran pajak yang dilakukan tergolong rendah.

Hasil penelitian Hanum (2013) mengenai ROA yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak mendukung penelitian ini. Penghindaran pajak merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Penghindaran pajak juga dapat membebankan biaya yang signifikan, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suardana (2014) serta Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga perusahaan kemungkinan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Pengaruh *Current Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_2 ditolak dan H_0 diterima, artinya *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.446 (lebih besar dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0.012. Adanya hasil penelitian yang menemukan hubungan negatif antara *current ratio* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *current ratio* maka BUMN cenderung rendah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dan semakin rendah tingkat *current ratio* maka BUMN cenderung tinggi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Tidak signifikannya hubungan antara *current ratio* dengan penghindaran pajak dapat disebabkan karena BUMN cenderung menjaga likuiditas di kisaran rata-rata 156.4537% sehingga bisa dimaknai BUMN mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat BUMN yang memiliki tingkat *current ratio* dibawah 100%, namun kesulitan likuiditas tersebut tidak mempengaruhi BUMN dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, karena berdasarkan data sampel penelitian BUMN yang memiliki tingkat *current ratio* dibawah 100% hanyalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dimana BUMN tersebut justru memiliki peningkatan dalam pembayaran pajaknya sejak

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Sehingga penurunan tingkat *current ratio* tidak membuat BUMN menurunkan tingkat pembayaran pajaknya.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Suyanto dan Supramono (2012) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaran nilai likuiditas yang relatif sama mendasari hasil yang tidak signifikan dalam penelitian.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Adisamartha dan Noviani (2015) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan secara positif, dimana perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih agresif terhadap pajak yang diterima karena likuiditas yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang tinggi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0.971. Adanya pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN, dan semakin rendah tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh BUMN. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN, sehingga sulit bagi BUMN untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pemilik institusional dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang oportunistik dan tidak ingin mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi BUMN, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak dan melakukan tugasnya sebagai kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen BUMN dengan meminimalkan keputusan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pohan (2008) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Kondisi tersebut akibat kepemilikan institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan menghindari resiko yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014), Hanum (2013) dan penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut karena pemilik institusional belum mampu mengontrol dengan baik tindakan manajemen atas sikap oportunistiknya dalam melakukan manajemen laba.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 (lebih kecil dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0.382.

Berdasarkan hipotesis telah terbukti bahwa selama periode pengamatan, ada kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Peraturan Bapepam mensyaratkan proporsi komisaris independen untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebesar 30%, sementara rata-rata proporsi komisaris independen yang dimiliki BUMN yang menjadi sampel sebesar 42.2938%. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen

terhadap bonus, dimana manajemen berkepentingan untuk mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Hasil ini mendukung pendapat Maharani dan Suardana (2014) dan Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan keberadaan dewan komisaris independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja manajemen dan efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan.

Namun hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hanum (2013) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak semua anggota dewan komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang banyak dapat menyebabkan sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_5 ditolak dan H_0 diterima, artinya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.117 (lebih besar dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 4.554. Kualitas audit menunjukkan hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi kualitas audit maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan BUMN yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada, namun jika BUMN dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP, seperti halnya kasus Enron tahun 2004. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika KAP dengan reputasi yang baik dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak.

Tidak signifikannya hubungan kualitas audit dengan penghindaran pajak dapat disebabkan pada data sampel penelitian, PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dapat mempertahankan tingkat CETR lebih dari 30% pada tahun 2012-2015 yang menunjukkan bahwa CETR yang dimiliki BUMN melebihi tarif PPh badan sebesar 25% yang mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan BUMN tergolong rendah meskipun diaudit oleh KAP *The Big Four*. Sehingga dengan kualitas audit yang tinggi maupun rendah, BUMN tidak menjadikan kualitas audit sebagai alasan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini mendukung penelitian Sari *et al.* (2016) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Perusahaan masih dapat mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada KAP. Munculnya kasus Enron membuat kepercayaan publik turun terhadap KAP *The Big Four* dan mengembalikan kepercayaan publik tersebut tidaklah mudah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh KAP *Non The Big Four* untuk berlomba-lomba menunjukkan keprofesionalitasannya pada publik dengan meningkatkan kualitas dan independensi auditnya.

Namun hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) dan penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar

diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak dan H_6 diterima, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.027 (lebih kecil dari 0.05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -1.942. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Bertambahnya jumlah komite audit akan menyebabkan perusahaan bekerja lebih efektif termasuk dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Hal ini dikarenakan beragamnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit memiliki pengalaman yang memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Komite audit berperan dalam memilih metode-metode akuntansi yang efektif dan tepat bagi perusahaan. Adanya pengaruh komite audit yang signifikan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya anggota komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada BUMN. Sehingga peran komite audit efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014) dan Pohan (2008) yang memperoleh hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hanum (2013) serta Kurniasih dan Sari (2013) yang memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit perusahaan tidak berjalan dengan baik dapat disebabkan pelaksanaan yang kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada di dalam perusahaan yang menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan lebih cenderung netral.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) *Return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) *Current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (3) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (4) Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (5) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (6) Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Bagi investor, disarankan untuk memilih BUMN yang memiliki struktur tata kelola perusahaan yang baik. (2) Bagi kalangan regulator dapat membuat kebijakan perpajakan untuk menghalangi tindakan penghindaran pajak dengan menggandeng investor institusional, komisaris independen dan komite audit guna membantu dalam melakukan *monitoring* atas kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. (3) Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih baik jika memperluas obyek penelitian dan sebaiknya dapat memasukkan variabel lain untuk mengukur nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F. dan N. Noviari. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN 2303-1018 13(3):973-1000.
- Dewi, K. dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* ISSN 2302-8556 6(2): 249-260.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Kedua. Prentice Hall. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, M. M. dan A. Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Handayani, F. 2015. Komparasi Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi. *Skripsi*. Program Srata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Padang.
- Hanggraeni, D. 2014. *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hanum, H. R. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kurniasih, T. dan M. M. R. Sari. 2013. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* ISSN 1410-4628 18(1):58-66.
- Maharani, I. G. A. C. dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN 2302-8556 9(2):525-539.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. 01 Agustus 2011. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobins, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.co.id/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html>. 24 September 2016 (14.35).
- Prebble, Z. M. dan J. Prebble. 2012. The Morality of Tax Avoidance. *Victoria University of Wellington Legal Research Paper* 2(2):693-744.
- Rinaldi, dan C. Cheisviyanny. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* (2):472-483.
- Rodriguez, E. F. dan A. M. Arias. 2013. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate. *The Chinese Economy* 45(6):60-83.
- Sari, N., N. Kalbuana, dan A. Jumadi. 2016. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang* ISSN 2460-0784: 431-440.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R and D*. Alfabeta. Bandung.

- Suyanto, K. D. dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 2(16):167-177.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.